

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan politik identitas yang semakin mencuat di tingkat lokal dapat dimengerti sebagai manifestasi dari prinsip dasar politik terdesentralisasi. Visibilitas gerakan politik identitas meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 22/1999. Secara signifikan, berbagai entitas politik lokal dan nasional dengan cerdas menggunakan masalah ini sebagai sarana untuk mempengaruhi dinamika kekuasaan dan membentuk narasi komunal, memfasilitasi proses eksploitasi, terutama di kalangan milenial. Elit lokal di empat wilayah dengan cerdas merancang kerangka politisasi identitas, memungkinkan individu yang secara historis terpinggirkan untuk mencapai dan menggunakan kekuasaan. Fenomena yang diamati dalam lanskap politik lokal melibatkan konstruksi strategis dari dikotomi oposisional oleh elit politik. Perbedaan yang dibuat-buat ini sengaja ditujukan untuk menyerang lawan politik atau saingan mereka yang dianggap sebagai 'musuh'.

Remaja menunjukkan kerentanan yang meningkat terhadap dampak masalah politik dan manipulasi yang terkait dengan politik identitas. Politik identitas dalam generasi milenial merupakan platform bagi berbagai kelompok untuk mengekspresikan etnis, suku, budaya, agama, atau aspek identitas lainnya. Ini dapat digunakan sebagai bentuk resistensi atau sebagai

cara untuk memfasilitasi komunikasi dan pemahaman di antara remaja yang memiliki pandangan dan pendapat serupa dalam komunitas mereka. Sayangnya, fenomena ini dapat dimanipulasi oleh mereka yang memahami karakteristik unik dari remaja akhir, yang mungkin belum memiliki pemahaman politik yang kuat tetapi dipengaruhi oleh idealisme yang umumnya terkait dengan kelompok usia mereka. Pengaruh ini sering diperkuat oleh kekuatan media sosial.

Menentukan identitas nasional Indonesia tidak hanya melalui pemeriksaan ciri fisik. Indonesia menunjukkan ragam budaya, ras, dan agama yang mencolok, yang secara bersama-sama berkontribusi pada identitasnya yang unik dan beragam. Memahami identitas nasional dan karakter Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melampaui batas metodologi statistik. Konsep identitas nasional melampaui batas Konstitusi 1945 dan lebih lanjut diabadikan dalam kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Di dalam undang undang tersebut terdapat prinsip filosofis yang mendasari perbedaan Indonesia dari negara-negara lain yang sangat penting.

Munculnya politik identitas di Indonesia memerlukan kewaspadaan karena berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Menurut Al-Farisi (2020), konsep politik identitas dapat dikonseptualisasikan sebagai fenomena politik yang

menekankan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu lingkup ruang politik.

Partisipasi politik sangat penting dan sangat diperlukan dalam sistem demokrasi. Contoh dari fenomena ini dapat dilihat dalam sistem demokratis, di mana elit berpartisipasi dalam lingkungan kompetitif untuk mendapatkan dukungan publik. Di dunia persaingan politik, ada kelompok individu yang dikenal sebagai elit. Individu-individu ini bekerja keras untuk mendapatkan dukungan publik, karena tujuan utamanya adalah untuk mengamankan posisi kekuasaan dan otoritas di arena politik. Tujuan utama mereka adalah untuk mencapai posisi seperti itu. Salah satu cara untuk menunjukkan dukungan mereka adalah dengan berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum dengan menggunakan hak suara untuk memilih individu atau partai politik yang diinginkan individu dalam jabatan publik.

Penilaian kualitas demokrasi suatu negara tergantung pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya terlibat dalam kegiatan politik. Sejauh mana populasi terlibat dalam tindakan pemungutan suara tidak diragukan lagi akan mempengaruhi kaliber pemilihan pemimpin. Ketika seorang pemimpin mencapai kemenangan dengan partisipasi masyarakat, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi pemimpin di mata warga. Pemimpin mengambil peran penting sebagai perwakilan masyarakat. Ideologi Pancasila mencakup serangkaian prinsip, dengan prinsip keempat menekankan pentingnya demokrasi yang dipandu oleh

kebijaksanaan dalam proses deliberasi perwakilan. Indikator utama untuk mengevaluasi efektivitas sistem demokrasi terletak pada tingkat keterlibatan masyarakat yang diungkapkan melalui partisipasi aktif dalam proses pemilihan, terutama pada pemungutan suara.

Partisipasi politik mencakup ruang lingkup yang lebih luas daripada sekadar pemungutan suara, karena meliputi berbagai kegiatan baik sebelum dan sesudah kampanye pemilu. Upaya pra- dan pasca-kampanye ini juga diakui sebagai bentuk partisipasi politik. Aktivitas partisipasi politik pra-pilih, seperti bergabung dengan tim sukses dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye, diakui sebagai komponen partisipasi. Setelah tindakan pemungutan suara, menjadi penting untuk terlibat dalam partisipasi politik sebagai sarana untuk secara efektif memantau dan mengawasi fungsi pemerintah. Pentingnya partisipasi politik dalam sistem demokratis tidak dapat ditebak, karena itu adalah persyaratan fundamental untuk kesuksesan sistem tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Zarkasi & Rizal (2020), mengungkapkan penurunan partisipasi politik di antara penduduk perkampungan Telanaipura di Indonesia, sehingga menyoroti tingkat keseluruhan keterlibatan politik di negara ini. Pemilihan walikota tahun 2013 menyaksikan total 29.650 suara, sedangkan pemilihan Walikota berikutnya pada tahun 2018 mencatat penurunan partisipasi pemilih, dengan hanya 21.443 suara yang dikeluarkan. Data menunjukkan penurunan ketara

dalam tingkat partisipasi politik di antara populasi Telainapura. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh (Djuyandi et al., 2019), wilayah Jawa Barat yang diteliti dalam hal partisipasi politik di kalangan pemilih pemula. Studi ini mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan, yang menunjukkan tingkat keterlibatan politik yang rendah di antara kelompok ini. Secara khusus, dari total pemilih terdaftar, yang mencapai 31.974.728 orang di 18 kecamatan dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat, hanya 30% pemilih pemula yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan etnis, telah menyaksikan bagaimana keberagaman ini menjadi titik fokus dalam politik identitas. Dalam dinamika politik yang berkembang, keberagaman tersebut sering dijadikan komoditas strategis oleh politisi, khususnya selama periode pemilihan umum. Politik identitas, sebagai alat perjuangan, muncul sebagai daya dorong bagi kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan massa, namun, dampaknya tidak jarang menyiratkan potensi perpecahan dan polarisasi di tengah-tengah masyarakat.

Mahasiswa, sebagai agen perubahan sosial dan politik, memiliki peran sentral dalam menghadapi politik identitas yang berkembang. Di satu sisi, mereka turut serta dalam menyelesaikan kasus intoleransi dan diskriminatif yang terjadi, namun di sisi lain, politik identitas juga dapat mempengaruhi persepsi dan pelaksanaan politik mahasiswa, terutama

ketika terlibat dalam proses pemilihan umum. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan pemikiran mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran krusial dalam membentuk identitas dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan politik. Pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan sosial yang tinggi. Partisipasi politik mahasiswa memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik dan dinamika politik suatu bangsa. Mahasiswa sering dianggap sebagai agen perubahan yang dapat menggerakkan perubahan sosial dan politik. Namun, dalam konteks ini, penelitian akan difokuskan pada pengaruh politik identitas terhadap partisipasi politik mahasiswa.

Pemanfaatan identitas sebagai saluran politik tentunya akan memberikan dampak terhadap stabilitas sosial, dan ketiak tidak terkontrol maka akan melahirkan konflik sosial di masyarakat secara luas. Konflik sosial itu muncul sebagai langkah fundamental dalam menyerukan hak dan keinginan politiknya secara terbuka, meskipun hasil akhirnya akan berhasil atau bahkan chaos (Effendi & Syafrudin, 2020)

Pemahaman terhadap politik identitas menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti suku, agama, gender, dan kelompok sosial lainnya dapat memainkan peran signifikan dalam pembentukan sikap dan perilaku politik.

Politik Identitas mahasiswa dapat membentuk pandangan mereka terhadap isu-isu politik, mempengaruhi pilihan partai politik, serta menentukan tingkat partisipasi dalam berbagai kegiatan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik di tingkat mahasiswa semakin menarik perhatian, baik dari segi penelitian maupun pengamatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diinisiasi untuk lebih mendalam memahami bagaimana politik identitas memengaruhi tingkat partisipasi politik mahasiswa.

Semua warga negara, termasuk mahasiswa, memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan politik. Mahasiswa adalah sekelompok orang muda yang diberi kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan formal di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi lainnya. Mereka memiliki kewajiban ideologis untuk menjadi penerus bangsa masa depan. Sikap Profesional dapat diharapkan untuk mengambil tanggung jawab dan mengembangkan keahlian di berbagai bidang. Tujuannya adalah untuk memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan. (Alfian, 2019) berpendapat bahwa generasi muda paling cocok untuk sosialisasi politik karena kecenderungan mereka untuk mengembangkan sikap yang kuat, pemikiran kritis, dan tingkat egoisme yang tinggi. Pendidikan politik adalah proses belajar yang penting yang memungkinkan mahasiswa untuk memupuk kesadaran politik dan meningkatkan kemampuan mereka di bidang afektif, kognitif, dan

psikomotor. Ini juga membantu mereka memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa dan warga negara.

Pemilihan Umum BEM dapat berkontribusi secara efektif pada partisipasi politik mahasiswa, mempromosikan kesadaran politik mereka dan mendorong partisipasi aktif mereka. Namun, jelas ada penurunan partisipasi siswa dalam pemilihan nasional. Pada tahun 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya mengalami penurunan jumlah suara yang diterima dalam pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemilihan Umum FKIP di Universitas Pasundan, total 2.300 siswa berpartisipasi dalam pemungutan suara. Namun, ada 208 suara yang tidak valid untuk DPM dan 163 suara tidak sah untuk BEM. Pada pemilihan umum 2016 Fakultas Lampung Ushuluddin IAIN, hanya 460 dari 3.000 siswa aktif yang berpartisipasi dalam pemungutan suara. Selain itu, insiden serupa juga terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, khususnya yang melibatkan BEM Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2019. Dari total populasi 3.641 siswa yang terdaftar di UNESA FISH, hanya 1.279 siswa, sekitar 35%, yang berpartisipasi dalam proses pemungutan suara (Sulistyo & Fauzi, 2020). Jumlah suara yang rendah menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah di antara mahasiswa dalam pemilu. Perhitungan yang dilakukan oleh beberapa universitas menunjukkan bahwa ada tingkat partisipasi mahasiswa yang rendah dalam pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Negeri Jakarta, terjadi fenomena di mana minat pemilih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari jumlah suara yang masuk selama dua hari pemungutan suara yang relatif sedikit, yaitu hanya 60 suara dari total 332 mahasiswa yang memiliki hak suara dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Meskipun terdapat dua hari untuk pemilihan, namun hanya sebagian kecil dari total pemilih yang aktif mengambil bagian dalam proses demokrasi ini, menunjukkan bahwa minat atau partisipasi pemilih dalam pemilihan BEM tersebut dapat dikategorikan sebagai rendah.

Pemilihan umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu proses demokratisasi di lingkungan kampus yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan calon pemimpin mahasiswa. Proses pemilihan ini terdiri dari beberapa tahap, di antaranya Pemilihan Raya (Pemira) untuk BEM Universitas, BEM Fakultas, dan BEM Program Studi (Prodi). Pada pemilu pertama atau putaran pertama, calon BEM Universitas di antaranya adalah Lingga/Tsabit dan kotak kosong. Dari dugaan sementara, terdapat kecenderungan bahwa calon Lingga/Tsabit menggunakan politik identitas, yang didasarkan pada latar belakang atau aspek identitas tertentu, seperti etnis, agama, atau kelompok sosial. Hal ini dapat terlihat dari strategi kampanye atau platform yang mereka usung.

Dalam putaran pertama pemilu BEM Universitas, kotak kosong unggul dalam jumlah pemilih di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih di Prodi PPKN lebih memilih opsi kosong daripada memilih calon tertentu, mungkin karena kekhawatiran terhadap representasi atau pemahaman terhadap visi-misi dari kedua calon yang ada. Namun, pada putaran kedua pemilu BEM Universitas, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah partisipan pemilih. Hanya 61 pemilih yang berpartisipasi dalam putaran kedua, dibandingkan dengan 164 pemilih dalam putaran pertama. Hal ini menunjukkan adanya penurunan minat atau partisipasi dalam proses pemilihan, mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kejelasan visi-misi calon, ketidakpuasan terhadap proses pemilihan sebelumnya, atau mungkin adanya persepsi bahwa pemilihan tersebut tidak sepenuhnya mewakili kehendak mahasiswa.

Dugaan bahwa calon dalam putaran kedua menggunakan politik identitas secara luas juga menjadi pertimbangan. Hal ini dapat dilihat dari afiliasi atau latar belakang calon yang terkait dengan organisasi yang sama, sehingga terkesan bahwa pemilihan tersebut hanya sebagai sandiwara belaka. Reaksi negatif seperti hujatan di media sosial juga menunjukkan adanya ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan dan para calonnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara pemahaman politik identitas dan partisipasi politik mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dalam konteks pemilihan umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pemahaman politik identitas menjadi subjek utama karena dinamika yang kompleks yang terjadi dalam proses pemilihan umum BEM di UNJ, terutama terkait dengan strategi politik identitas yang digunakan oleh calon-calon dalam kampanye mereka.

Misalnya, pada pemilu pertama, terdapat indikasi bahwa calon tertentu menggunakan politik identitas dalam upaya untuk memenangkan pemilihan. Dugaan sementara menunjukkan bahwa strategi ini didasarkan pada latar belakang atau aspek identitas tertentu, seperti kelompok sosial, agama, atau afiliasi organisasi. Hal ini mencerminkan bagaimana pemahaman politik identitas dapat memengaruhi strategi kampanye dan persepsi pemilih terhadap calon. Selain itu, fenomena penurunan partisipasi pemilih dari putaran pertama ke putaran kedua juga menarik untuk diselidiki. Hal ini mengindikasikan adanya potensi ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan, terutama jika calon-calon dalam putaran kedua juga terlibat dalam politik identitas yang sama-sama kompleks.

Dengan demikian, pemilihan umum BEM Universitas di UNJ menggambarkan dinamika yang kompleks dalam partisipasi politik

mahasiswa, termasuk penggunaan politik identitas, tingkat partisipasi pemilih, serta dinamika politik internal dalam organisasi mahasiswa.

Pemahaman yang mendalam tentang politik identitas dapat memengaruhi perilaku pemilih, terutama dalam konteks pemilihan umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Seorang pemilih yang memahami konsep politik identitas mungkin akan dapat mengidentifikasi praktik politik identitas yang sedang terjadi dalam pemilihan tersebut. Dengan pemahaman tersebut, mereka mungkin menjadi kurang termotivasi atau bahkan malas untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Dalam kasus konkret pemilihan BEM UNJ, pemahaman politik identitas dapat membantu pemilih untuk melihat apakah calon-calon atau kelompok calon yang bersaing menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye. Contohnya, pada putaran pertama pemilihan BEM Universitas, terdapat indikasi bahwa salah satu calon atau kelompok calon menggunakan politik identitas dalam upaya mempengaruhi pemilih.

Pemilih yang memahami bahwa pemilihan tersebut dipengaruhi oleh politik identitas mungkin merasa kurang tertarik atau malas untuk berpartisipasi. Hal ini bisa disebabkan oleh pandangan bahwa pemilihan yang dipengaruhi oleh politik identitas tidak sepenuhnya mencerminkan esensi dari demokrasi dan kepentingan umum, melainkan lebih merupakan pertarungan identitas dan kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, pemahaman politik identitas dapat menjadi faktor yang

memengaruhi tingkat partisipasi pemilih, terutama jika pemilih merasa bahwa pemilihan tersebut tidak memadai dalam mewakili aspirasi dan kepentingan mereka sebagai warga kampus. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang kritis dan menyeluruh tentang politik identitas dalam konteks partisipasi politik mahasiswa.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjabaran latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang teridentifikasi ialah sebagai berikut:

1. Adanya dampak politik identitas pada mahasiswa
2. Rendahnya Partisipasi Politik Mahasiswa.
3. Pendidikan politik yang tidak efektif di perguruan tinggi.

C. Pembatasan Masalah

Dalam kaitannya dengan masalah yang ada, sangat penting bahwa penyelidikan yang akan datang dibatasi dengan tepat. Fokus dari studi ini berpusat pada pembatasan yang dikenakan pada keterlibatan mahasiswa dalam politik, khususnya terkait dengan partisipasi mereka dalam pemilihan umum BEM UNJ. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengaruh politik identitas pada keterlibatan individu dalam kegiatan politik kampus.

Penelitian ini juga melakukan pembatasan terhadap mahasiswa yang akan diteliti, yaitu pada mata mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman politik identitas terhadap partisipasi politik mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dalam pemilihan umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (BEM UNJ)?" Rumusan masalah ini mengarah pada analisis kompleks mengenai pengaruh antara politik identitas dan partisipasi politik mahasiswa, dengan mempertimbangkan konteks spesifik PPKN dan proses pemilihan BEM UNJ sebagai studi kasus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang dinamika politik identitas mahasiswa. Analisis yang mendalam terhadap interaksi kompleks antara pemahaman politik identitas, dan partisipasi politik mahasiswa dapat menjadi kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori politik identitas dan pemahaman nilai-nilai ideologis dalam konteks pendidikan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara praktis, yaitu :

a. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang mendalam dalam mengembangkan metodologi penelitian, analisis data kuantitatif, serta keterampilan dalam merumuskan temuan penelitian. Proses penulisan juga dapat meningkatkan kemampuan sintesis dan penyajian ide secara ilmiah, yang merupakan keterampilan penting dalam karier akademis atau penelitian.

b. Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini menyediakan sumber referensi yang berharga terkait pemahaman politik identitas mahasiswa dan implikasinya terhadap partisipasi politik. Informasi yang diberikan dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan atau perencanaan kebijakan di lembaga pendidikan tinggi, organisasi mahasiswa, dan instansi terkait.